

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelebihan dari otonomi daerah yaitu, daerah dapat mengatur pengelolaan sumber dayanya sendiri. Pengelolaan yang disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing tidak akan menciptakan daerah yang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan potensinya dan daerah yang lebih banyak sumber daya alam dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional. Mengurangi kemungkinan kesewenangan pusatpun menjadi kelebihan dari otonomi daerah, kaerena otonomi daerah juga membatasi kekuasaan pemerintah pusat secara tidak langsung. Hal ini mengurangi kemungkinan kesewenangan pemerintah pusat menerapkan aturan dan kebijakan yang tidak sesuai aspirasi rakyat atau bahkan mencegah terjadinya kediktatoran. Otonomi daerah juga mempunyai kelemahan otonomi daerah sendiri yaitu adanya kesenjangan antar daerah, karena tidak semua wilayah mempunyai sumber daya yang banyak atau sumber daya yang tidak dapat dikelola dengan baik. Akibatnya, terjadi kesenjangan antar daerah.

Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.*

Negara memiliki tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui pembangunan. Menurut Adam Smith (Simarmata, 2008), tugas negara dimaksud, yaitu pertama adalah negara berkewajiban memberi rasa aman dan nyaman dari segala macam dalam bentuk apapun. Situasi yang tidak stabil, baik secara sosial maupun politik, akan menyulitkan upaya mewujudkan kesejahteraan. Kedua, negara juga harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan. Pemikiran Adam Smith tersebut menegaskan, bahwa pembangunan diselenggarakan tidak semata-mata hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi secara keseluruhan juga berorientasi pada penciptaan kondisi sosial. Artinya, dimensi ekonomi dan sosial merupakan dua dimensi utama yang dapat digunakan sebagai titik masuk (*entry point*) untuk mengukur pembangunan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB. PDRB untuk menentukan strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian baik untuk mengevaluasi memperbaiki dan melanjutkan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masyarakat suatu wilayah disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional daerah khususnya dibidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional atau daerah. Menurut Nanga (2001) pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan kuantitatif yang diukur dengan memakai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau *output* per kapita dimana PDRB adalah *total market value* dari *final goods and services* yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Menurut Sukirno (2002) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran meningkat.

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, tentunya berdampak pada kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah dalam menyejahterahkan masyarakatnya di kemudian hari. Contohnya jika laju ekonomi sedang naik dan tumbuh pesat maka bisa menjadi investasi atau membangun fasilitas merata di suatu daerah. Sedangkan jika laju ekonomi kurang maksimal maka bisa memutuskan untuk bekerjasama dengan daerah lain yang mampu mengangkat perekonomian tersebut.

PDRB di Kota Cimahi terdapat beberapa sektor yaitu, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengolahan, Sektor Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatann dan Kegiatan Sosial, dan Sektor

Jasa Lainnya. PDRB di Kota Cimahi mengalami fluktuasi yang tentu berakibat pada pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi sehingga muncul pertanyaan sektor manakah yang paling tinggi berkembang dan yang paling rendah berkembang oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PDRB DI KOTA CIMAHI**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana kondisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana kondisi PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) Kota Cimahi.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Bagi Penulis

Menambah pemahaman yang lebih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah dan kinerja pada suatu pemerintah kota.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian- penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai produk domestik regional bruto di daerah.

3. Manfaat Bagi Pemerintahan

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi mengenai sektor-sektor daerah agar dapat meningkatkan kinerja serta pertumbuhan ekonominya.
- b. Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun *stakeholder* untuk mengetahui sektor apa sajakah yang paling berkembang dan paling dominan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

